

Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Karesidenan Malang Tahun 2015-2019

Yery Arif Ramadhan^{a*}, Setyo Wahyu Sulistyono^b

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

*Corresponding author : irey.arif99@gmail.com

Artikel Info

Article history:

Received 14 September 2021

Revised 5 Oktober 2021

Accepted 18 November 2021

Available online 29

November 2021

Keyword: *Income Distribution Inequality; Total Population; Minimum Wages; Economic Growth.*

JEL Classification

E24, E25, O11, F43, R10

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of total population, minimum wages and economic growth against income distribution inequality. The object in the research is a the residency of Malang. The research used secondary data in 2015-2019 obtained from Central Bureau of Statistics Republic of Indonesia. The data analysis technique in this research used the panel data regression analysis with help of Eviews 11 software. The results indicates that total population and minimum wages significantly influence on income distribution inequality, while economic growth has no impact on income distrubution inequality.

PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Ketimpangan pada umumnya lebih banyak terjadi di Negara-negara berkembang atau Negara yang baru memulai pembangunan ekonominya. Sedangkan di Negara maju tingkat pendapatan yang lebih tinggi atau pembangunannya cenderung lebih merata. Hal ini dijelaskan oleh (Todaro and Smith, 1981) bahwa Negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Indonesia termasuk Negara berkembang yang masih menghadapi masalah-masalah besar, salah satunya adalah masalah ketimpangan ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia tertantum sangat kurang baik di dunia. Bersumber pada survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, 49,3% kekayaan nasional dikuasai 1% orang terkaya di Indonesia. Keadaan ini lebih baik dibanding India, Thailand, dan Rusia. Indonesia terdapat beberapa provinsi yang memiliki ketimpangan di atas nasional. Menurut BPS, dari tahun 2014-2018 diketahui bahwa ada Sembilan provinsi yang secara konsisten memiliki angka ketimpangan pendapatan di atas angka nasional. Lima dari Sembilan provinsi tersebut dari Pulau Jawa. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami ketimpangan semakin melebar di atas angka nasional tahun 2010-2017. Hal ini terkonfirmasi dari ketimpangan yang ada di empat daerah yang secara sosio-demografis sangat dominan di Jawa Timur, yakni daerah Pandalungan (Kabupaten Situbondi,

Kabupaten Lumajang dan sekitarnya), Mataraman (Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan sekitarnya), Arek dan Madura. Daerah Arek meliputi Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu dan sekitarnya (Arzaqi and Astuti, 2020).

Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI tahun 1819 No. 16 menjadi wilayah Karesidenan Pasuruan meliputi Pasuruan, Bangil dan Malang. Namun sekitar tahun 1928 terjadi pemindahan pemerintahan Karesidenan dari Pasuruan ke Kota Malang. Bersamaan itu, ada peleburan Karesidenan Pasuruan dengan Karesidenan Probolinggo dan Lumajang sebelumnya merupakan bagian dari Karesidenan Probolinggo. Sejak pada tahun 1930, pusat karesidenan berpusat di Kota Malang dan disebut Karesidenan Malang dengan terdiri dari 8 wilayah yang berada diprovinsi Jawa Timur yang mencakup: (1) Kota Malang, (2) Kota Batu, (3) Kota Pasuruan, (4) Kota Probolinggo, (5) Kabupaten Malang, (6) Kabupaten Pasuruan, (7) Kabupaten Probolinggo, dan (8) Kabupaten Lumajang. Perbedaan karakteristik pada masing-masing wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari disetiap daerah karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya yang berbeda menjadikan setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kewajaran bila pola pembangunan ekonomi pada suatu wilayah tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan diukur dalam distribusi pendapatan masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal (Adipuryanti and Sudibia, 2015). Koefisien Gini atau Indeks Gini adalah sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Jika mendekati nol maka distribusi pendapatan menunjukkan pemerataan sempurna, sebaliknya koefisien yang semakin mendekati satu berarti distribusi pendapatan menunjukkan ketidakmerataan sempurna. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka rasio gini Kota Malang mencapai 0.42 persen, dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur pada 2017 lalu. Angka itu terus meningkat tiga tahun terakhir, tepatnya 0.38 persen pada 2015, dan 0.41 persen pada 2016 silam. Menurut Kepala Badan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang M Sarjan mengungkapkan, ada sejumlah factor yang mempengaruhi tingginya rasio gini salah satunya yaitu ketimpangan Antara yang paling miskin dan kaya. Ada banyak factor mulai dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tinggi, inflasi rendah, kemiskinan rendah, dan pertumbuhan ekonomi. Kota Pasuruan sendiri memiliki rata-rata ketimpangan sedang dengan angka rasio gini sebesar 0.39 pada tahun 2015 dan naik menjadi 0.40 pada tahun 2016. Sedangkan rasio gini terendah berada di Kota Probolinggo dengan rasio gini 0.27. Rasio gini dikatakan ketimpangan rendah apabila kurang dari 0.3. Hal ini merupakan peningkatan dalam

penurunan ketimpangan di Kota Probolinggo. Pasalnya 2 tahun terakhir mengalami ketimpangan moderat mencapai 0.37.

Pertumbuhan penduduk dapat memberikan efek yang tidak baik terhadap ketimpangan. (Todaro and Smith, 2008) mengatakan, ketimpangan distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, dan investasi. (Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan di Karesidenan Malang. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya dapat mendorong maupun menjadi penghambat ketimpangan distribusi pendapatan (Agusalim and Pohan, 2018). Pertumbuhan jumlah penduduk dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk jika diibaratkan pelaku dapat menjadi sumber daya bagi factor produksi. Jika produktifitas setiap penduduk tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan juga mampu mendorong angka ketimpangan pendapatan semakin mengecil. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indicator dari keberhasilan suatu pembangunan disetiap daerah dalam suatu perekonomian. Jika semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin baik tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan daerah dengan arah negative. artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga output juga akan meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil.

Pada topik pembahasan terkait variable dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra, 2011) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Adipuryanti and Sudibia, 2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh. Penelitian (Nurlina and Chaira, 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Ratnasari, 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Matondang, 2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Anshari dkk, 2019) menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Nadya and Syafri, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian (Khoirudin and Musta'in, 2020) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian terdahulu dengan topik ketimpangan distribusi pendapatan, banyak memakai beragam variable dan hasil yang tidak sama, menjadikan penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan tiga variabel bebas yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu: jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan lain selain variabel bebas adalah jangka waktu data yang digunakan, yakni data tahun 2015-2019, dengan jenis data Time Series (runtun waktu), dan teknik analisis data yang menggunakan analisis data panel. Penelitian ini terdapat pengurangan atau penambahan variabel dari penelitian-penelitian terdahulu dan terdapat pula penambahan waktu, sehingga kondisi dan hasil yang didapatkan akan berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu adanya perbedaan hasil, maka rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ? (2) Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan? (3) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar : (1) Pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. (2) Pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. (3) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

METODE PENELITIAN

Jenis pada penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kota/Kabupaten diwilayah Karesidenan Malang yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian menggunakan teknik sensus dimana semua populasi Kabupaten/Kota diwilayah Karesidenan Malang yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dijadikan sebagai sampel. Metode pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan 9 jurnal terkait dan 3 data dari BPS. Teknik analisis data yang digunakan berupa pendekatan model estimasi (uji Chow, uji Hausman dan uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier*/ uji LM), perumusan model regresi data panel karena data panel sendiri cocok dalam penelitian ini karena data berbentuk gabungan antara cross section dan time series, dan pengujian hipotesis (uji signifikansi simultan, uji signifikansi, koefisien determinasi) dengan alat bantu berupa *software Eviews 11*. Berikut persamaan regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \text{ it} \dots\dots(1)$$

Keterangan :

- Y = Ketimpangan distribusi Pendapatan
- JP₁ = Jumlah penduduk
- UM₂ = Upah Minimum
- PE₃ = Pertumbuhan ekonomi
- β₁- β₃ = Parameter variable independent
- a = Konstanta
- ε = *Tingkat Kesalahan Pengganggu*
- i = Data *Cross section*
- t = Periode time series

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Model Estimasi

Uji Chow

Table 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.417801	(7,29)	0.0000
Cross-section Chi-square	41.048885	7	0.0000

Berdasarkan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *chi-square* adalah 0.0000 lebih kecil dari 0.05, maka H₁ diterima atau model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman

Table 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.978353	3	0.0296

Berdasarkan hasil uji dapat diketahui bahwa nilai probabilitas uji hausman adalah 0.0296 lebih kecil dari 0.05 sehingga H₁ diterima atau model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Berdasarkan hasil pengujian pada uji chow dan uji hausman diperoleh bahwa model *Fixed Effect* lebih sesuai pada penelitian ini, maka tidak perlu lagi untuk melakukan pengujian pada Uji Lagrange Multiplier (LM).

Perumusan Model Regresi Data Panel

Table 3. Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.241622	0.443084	2.802230	0.0089
JUMLAH_PENDUDUK	1.69E-06	5.98E-07	2.826839	0.0084
UPAH_MIN	-0.160113	0.044755	-3.577517	0.0012
PERTUMBUHAN_EKONOMI	-0.041848	0.038885	-1.076190	0.2907

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.021315	R-squared	0.654760	
Mean dependent var	0.342000	Adjusted R-squared	0.535711	
S.D. dependent var	0.036739	S.E. of regression	0.025033	
Akaike info criterion	-4.308796	Sum squared resid	0.018173	
Schwarz criterion	-3.844354	Log likelihood	97.17592	
Hannan-Quinn criter.	-4.140868	F-statistic	5.499946	
Durbin-Watson stat	2.316031	Prob(F-statistic)	0.000146	

Berdasarkan table 3 dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1,241622 + 1,69E-07X_1 - 0,160113X_2 - 0,041848X_3 \dots\dots\dots (2)$$

Dari tabel 3 dijelaskan bahwa :

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 1,24 menyatakan jika nilai variable jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi bernilai 0 maka nilai ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 1,24.
2. Variabel jumlah penduduk memiliki nilai koefisien positif sebesar 1,69. Hal tersebut apabila jumlah penduduk bertambah satu-satuan atau 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami kenaikan 1,69.
3. Variabel upah minimum memiliki nilai koefisien negative sebesar -0,16. Hal tersebut apabila upah minimum bertambah satu satuan atau 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan sebesar -0,6 apabila variable independen lain diasumsikan konstan.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien negative sebesar -0,04. Hal tersebut apabila pertumbuhan ekonomi bertambah satu satuan atau 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan mengalami penurunan sebesar -0,04 apabila variable independen lain diasumsikan konstan.

Tabel 4. Cross-Section Fixed Effect

KAB_KOTA	Effect
1 Kota Malang	0.275458
2 Kota Batu	1.355834
3 Kota Pasuruan	1.337901
4 Kota Proboli...	1.236389
5 Kab Malang	-2.656012
6 Kab Pasuruan	-0.993929
7 Kab Proboli...	-0.358973
8 Kab Lumajang	-0.196667

Intersep tertinggi yaitu Kota Batu sebesar 1,355834. Nilai ini menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada saat jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi = 0 (konstan). Intersep terendah yaitu kabupaten Malang sebesar -2,656012. Nilai ini menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada saat jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi = 0 (konstan).

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji pada table 3, menunjukkan bahwa probabilitas keseluruhan variabel independen sebesar 0.000146 dimana lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian yaitu, jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan distribusi pendapatan.

Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil table 3 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah Penduduk

Berdasarkan table 3 nilai probabilitas t-statistic sebesar 0.0084 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0.05 yang dapat diartikan H_1 diterima. Maka variable independen jumlah penduduk berpengaruh terhadap variable dependen ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan.

Upah Minimum

Berdasarkan table 3 nilai probabilitas t-statistic sebesar 0.0012 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0.05 yang dapat diartikan H_1 diterima. Maka variable independen upah minimum berpengaruh terhadap variable dependen ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan.

Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan table 3 nilai probabilitas t-statistic sebesar 0.2907 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0.05 yang dapat diartikan H_1 ditolak. Maka variable independen pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variable dependen ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan table 3 diketahui bahwa nilai R^2 (*Adj-R-squared*) adalah 0.535711 yang menjelaskan bahwa variable independen jumlah penduduk, upah Minimum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yaitu sebesar 53%, sedangkan 47% lainnya dijelaskan oleh factor lain dari variable independen dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Jumlah penduduk terhadap besarnya ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan antara hasil dan hipotesis. Di hipotesis pertama menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setelah dilakukan pengujian hasil dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Karesidenan Malang. Pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu cenderung berdampak positif terhadap penduduk miskin. Jika penduduk miskin tersebut memiliki keluarga dengan banyak anggota maka memburuknya kemiskinan mereka akan diikuti dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Jumlah penduduk yang tinggi disuatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian dari (Matondang, 2018) dan (Putra, 2011). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan hasil penelitian dari (Adipuryanti and Sudibia, 2015).

Upah minimum terhadap besarnya ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan baik antara hasil dan hipotesis. Di hipotesis kedua menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setelah dilakukan pengujian hasil dapat disimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Karesidenan Malang. Hal ini dikarenakan pemerataan upah diwilayah Karesidenan malang masih belum teratasi dengan baik sehingga masih menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada dasarnya upah minimum tidak hanya menjadi batas minimum upah secara umum, tetapi juga mempengaruhi kenaikan pendapatan dan memiliki dampak penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Perubahan dalam undang-undang upah minimum merupakan faktor penting dan relevan memberikan kontribusi untuk memperlambat ketimpangan upah antara bagian atas dan bawah dari distribusi upah dan pendapatan di Indonesia (Khor dan Chun, 2010). Hasil penelitian ini sejalan penelitian dari (Khoirudin and Musta'in, 2020), (Istikharoh dkk, 2018). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan penelitian dari (Anshari dkk, 2019).

Pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan antara hasil dan hipotesis. Di hipotesis ketiga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Setelah dilakukan pengujian hasil dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Karesidenan Malang. Menurut (Todaro and Smith, 2006) menyatakan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi pola distribusi pendapatan akan semakin timpang dikarenakan adanya peningkatan agregat saving rate yang di ikuti meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh

orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang miskin. Apabila alasan terjadinya ketimpangan yang disebabkan pertumbuhan hanya diukur oleh rasio tabungan dirasa belum relevan karena porsi rasio tabungan terhadap PDB hanya sebesar 20 persen yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Karesidenan Malang. Hasil penelitian ini sejalan penelitian dari (Khoirudin and Musta'in, 2020), (Nadya and Syafri, 2019). Namun penelitian ini tidak sejalan penelitian (Adipuryanti and Sudibia, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait pengaruh jumlah penduduk, upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian bahwa variable jumlah penduduk (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, variabel upah minimum (X_2) berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan variabel pertumbuhan ekonomi (X_3) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., & Pohan, F. S. (2018). Trade Openness Effect on Income Inequality: Empirical Evidence from Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i1.5527>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Arzaqi, R. S., & Astuti, E. T. (2020). Kajian Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Timur Tahun 2010-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 514–523. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.195>
- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -. 2(1).
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17–30. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/8871>
- Luh, N., & Yuni, P. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Piramida*, 11(1), 20–28.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan

- Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37.
<https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Nurlina, & Chaira, T. M. I. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 174–182.
- PUTRA, L. D. (2011). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007*. 1–58.
- Ratnasari, L. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia* (3rd ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Economic Development* (9th ed.). Erlangga.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 1981. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, A. (2017). *No Title*.